

ABSTRAK

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan undang undang terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurus negara, proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang terjadi jelas merupakan sebuah pelanggaran administrasi yang nantinya berakibat hukum. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Sehingga timbul sebuah rumusan masalah yang dituliskan oleh penulis untuk menjawab sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat atau dapat digunakan untuk pengetahuan dan lain sebagainya.

Metode penelitian dalam tugas akhir ini berbentuk empiris penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, dimana permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *Inkonsistensi* dan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus yang berfokus pada aturan perundang undangan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah dilapangan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dalam beberapa aspek untuk membuktikan bahwa sebuah penyalahgunaan wewenang merupakan sebuah pelanggaran administrasi, yakni dari aspek otonomi desa, adminitrasi pemerintahan, dan penggunaan asas umum pemerintahan yang baik. selain itu dalam tugas akhir ini penulis menyajikan bentuk pemerintahan dalam tatanan desa dalam penggunaan asas umum pemerintahan yang baik.

**Kata kunci : Penyalahgunaan wewenang – Asas umum pemerintahan yang baik
– Admnistrasi Pemerintahan**

ABSTRACT

Government administrators are the broadest rights and authorities granted by law to people who are mandated to administer the state, the process of administering government is often misinterpreted because it is not in accordance with applicable laws and regulations, so this will lead to defects in the government process or in this thesis known as with abuse of power. The abuse of authority that occurs is clearly an administrative violation which will have legal consequences. The abuse of authority that has occurred by government administrators is the use of village funds to enrich themselves under the pretext of security money. So that a problem formulation arises which is written by the author to answer a problem that occurs in the community or can be used for knowledge and so on.

The research method in this final project is in the form of empirical research focusing on legal issues that are the reason this research was made, where the problems discussed in this research are inconsistency and use a statutory approach and a case approach that focuses on statutory regulations as the basis for answering the problem formulation. in the field.

The results of this study provide an overview in several aspects to prove that an abuse of authority is an administrative violation, namely from the aspect of village autonomy, government administration, and the use of general principles of good governance. In addition, in this final project the author presents the form of government in the village order in the use of general principles of good governance.

Keywords: Abuse of authority – General principles of good governance – Government Administration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Data	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	13
1.6.5. Analisis Data	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KONSEP DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, KONSEP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KONSEP ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, DAN KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG	17
2.1. Konsep Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17
2.1.1 Otonomi Desa.....	19
2.1.2. Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014	22
2.1.3. Penggunaan Dana Desa dan Sektor pengalokasiannya.....	24
2.2. Konsep Administrasi Pemerintahan.....	26
2.3. Konsep Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik	30
2.3.1. Sejarah Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	31
2.3.2. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU Nomor 30 Tahun 2014	33
2.4. Konsep Penyalahgunaan Wewenang	36
2.4.1. Konsep Wewenang dan Kewenangan.....	38
2.4.2. Batasan Kewenangan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS DESA PADEMAWU TIMUR, KABUPATEN PAMEKASAN).....	42
3.1. Penyalahgunaan Wewenang pada Penggunaan Dana Desa	42
a. Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Otonomi Desa.....	43
b. Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Administrasi Pemerintahan	46
c. Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	49
TABEL 3.1 PENGGUNAAN DANA DESA TERMASUK PELANGGARAN.....	51
3.2. Penerapan AUPB Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Desa Pademawu Timur.....	55

BAB IV PENUTUP	73
----------------------	----

4.1. Kesimpulan.....	73
----------------------	----

4.2. Saran	74
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penggunaan dana desa termasuk pelanggaran	47
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana di Pademawu Timur	55
Tabel 3.2 Rangkuman Pembahasan Rumusan Masalah Kedua	65